

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

BAB I PENDAHULUAN.....3

1.1 Latar Belakang3

1.2 Landasan Hukum4

1.3 Maksud Dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS SOSIALKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023.....7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah19

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial20

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah29

3.3 Program dan Kegiatan31

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH.....35

BAB V PENUTUP44

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kita sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan melalui Dinas Sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Humbang Hasundutan Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu – isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik

Doloksanggul, Januari 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

FRANS JUDIKA B. PASARIBU, SE.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Humbang Hasundutan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Humbang Hasundutan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025

dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak Corona Virus Disease 19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Awal RENJA Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial serta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan terselenggarannya pemerintah yang baik

b. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra SKPD
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah ini :

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan

Periode Pelaksanaan :Tahun 2023

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra OPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		PD Penang gung jawab
1	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16
		Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								8,492,677,896	32140	5,600,090,141	#DIV/0!	66	32140	5,600,090,141	#DIV/0!	#DIV/0!	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	Level					A	3,609,609,476	#VALUE!	2,920,584,273	#VALUE!	80.91	#VALUE!	2,920,584,273	#VALUE!	#DIV/0!	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			0	0	16	55,000,000	16	21,967,300	100	39.94	16	21,967,300	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			7	29507252	4	35,000,000	4	14,493,300	100	41.41	11	44,000,552	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			0	5984200	12	20,000,000	12	7,474,000	100	37	12	13,458,200	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerahh	Persen			100	1,942,613,165	95	2,793,400,372	95	2,310,198,080	100	82.70	195	4,252,811,245	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul			100	1,939,122,641	29	2,768,400,372	22	2,296,523,580	76	82.95	122	4,235,646,221	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			9	3,490,524	5	25,000,000	95	13,674,500	1,900	55	104	17,165,024	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persen			0	0	95	90,250,000	54	21,600,000	57	24	54	21,600,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			0	-	29	21,750,000	54	21,600,000	186	99	54	21,600,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			0	-	29	8,500,000	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0	0	4	60,000,000	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasana kantor	Persen			25	309179480	95	485,399,104	95	412,395,228	100	84.96	120	721,574,708	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			100	5615000	10	7,062,800	95	7,028,000	950	100	195	12,643,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			100	111005800	30	135,554,740	95	133,754,400	317	98.67	195	244,760,200	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			100	21,400,000	10	30,500,000	95	28,059,000	950	92.00	195	49,459,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			100	8,376,000	20	16,467,564	95	14,538,228	475	88.28	195	22,914,228	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			100	13,195,000	35	30,000,000	95	29,995,000	271	100	195	43,190,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			100	149,587,680	200	265,814,000	95	199,020,600	48	74.87	195	348,608,280	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			0	51,780,000	95	72,750,000	95	50,674,000	100	69.65	95	102,454,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			100	4,880,000	100	7,500,000	95	7,474,000	95	100	195	12,354,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			100	46,900,000	3	65,250,000	95	43,200,000	3,167	66.21	195	90,100,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			0	83,268,400	95	112,810,000	95	103,749,665	100	91.97	95	187,018,065	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			5	65,925,400	5	79,390,000	95	70,486,665	1,900	88.79	100	136,412,065	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			100	10,600,000	10	12,900,000	95	12,800,000	950	99	195	23,400,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	6,743,000	1	20,520,000	95	20,463,000	9,500	100	96	27,206,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	persen	88.55	959,134.92	0	-	91	858,034,700	198	698,126,700	218	81.36	198	698,126,700	224	72787.122	DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berkompeten	orang			0	-	66	858,034,700	66	698,126,700	66	81.36	66	698,126,700	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Tagana)	orang			0	-	20	196,136,100	20	168,466,900	20	85.89	20	168,466,900	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (TKSK)	orang			0	-	11	228,400,000	11	185,499,800	11	81.22	11	185,499,800	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurga Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH) yang dibina	orang			128	342,611,000	34	382,453,600	34	343,632,400	34	89.84943533	162	686,243,400	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat			0	-	2	51,045,000	1	527,600	1	1.033597806	1	527,600	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar	Persen	67.87	1,613,075.25	0	-	3703	3,195,034,800	365	1,064,713,600	10	33.3240064	365	1,064,713,600	538	66005.203	DINAS SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant yang dipenuhi kebutuhan dasarnya	Jiwa			0	37,480,000	757	2,824,563,000	365	878,556,800	48	31.1041673	365	916,036,800	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jiwa			0	-	350	436,153,950	350	422,970,700	100	96.97738608	350	422,970,700	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			0	-	200	249,498,450	0	-	-	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			0	-	114	338,409,800	114	123,843,100	100	36.59560095	114	123,843,100	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (30 orang Rumah Singgah) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (mayat terlarut) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (ODGJ)	orang			0	-	15	1,800,500,800	15	331,743,000	100	18.42504041	15	331,743,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen			0	37,480,000	95	370,471,800	41	186,156,800	43	50.2485749	41	223,636,800	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Data PMKS yang di verifikasi dan divalidasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			237	341,459,400	10327	55,000,000	0	40,660,800	-	73.92872727	237	382,120,200	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			0	-	16	155,472,000	16	145,496,000	100	93.58341052	16	145,496,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial yang terbentuk	unit			0	-	10	55,000,000	0	-	-	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen			0	-	4	104,999,800	0	-	-	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	27.92	780,931.33	50	3,105,568,533	547	525,949,520	30178	679,453,568	5,517	129.18608	30228	3,785,022,101	108,266	484680.53	DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang ditetapkan Penerima Bantuan	Jiwa			50	3,105,568,533	164000	525,949,520	30178	679,453,568	18	129.18608	30228	3,785,022,101	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jiwa			100	80,764,340	20000	36,948,000	20000	43,887,600	100	118.7820721	20100	124,651,940	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jiwa			100	187,529,080	20000	220,851,520	20000	182,101,260	100	82.45415744	20100	369,630,340	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			5400	2,452,616,000	155	268,150,000	153	453,464,708	99	169.1085989	5553	2,906,080,708	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	300,032.10	0	70,980,700	100	304,049,400	150	237,212,000	150	78.0175853	150	308,192,700	150	102719.91	DINAS SOSIAL
Perlindungan SosialKorban Bencana Alamdan SosialKabupatery/Kota	Persentase KorbanBencana Alam danBencana Sosial yangmendapatPerlindungan danBantuan	Persen			0	70,980,700	100	304,049,400	150	237,212,000	150	78.0175853	150	308,192,700	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100	63,805,300	100	173,801,000	100	147,121,400	100	84.64934034	200	210,926,700	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100	7,175,400	100	54,052,000	100	48,877,000	100	90.42588618	200	56,052,400	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			0	0	100	76,196,400	100	41,213,600	100	54	100	41,213,600	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS SOSIAL
TOTAL								4,241,000	10929	5,600,090,141	#DIV/0!	132046.455	10929	5,600,090,141	#DIV/0!	#DIV/0!	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS
2. Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel T-C 30

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial			80,22%	3,96%	3,96%	3,96%	78.06%	-	88.14%	92.10%	
2.	Indesk Kepuasan PMKS yang ditangani			80%	82%	84%	86%	80%		82%	84%	

3.	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial			100%	100%	100%	100%	100%				
4	Nilai Evaluasi AKIP			BB	BB	A	A					

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan karena masih tingginya PMKS yang belum terlayani
2. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri atau rumah singgah yang digunakan untuk melayani para PMKS
3. Masih Terbatasnya Sarana prasarana dalam penanganan PMKS
4. Masih minimnya peran serta kelembagaan dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran
6. Keterbatasan pendanaan pemerintah dan masih lemahnya pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah, membuat keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terasa kecil sekali kontribusinya

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya Peran Aktif PSKS dalam menanggulangi PMKS;
3. Adanya regulasi di daerah tentang kesejahteraan sosial;
4. Adanya instansi-instansi pemerintah dan Lembaga masyarakat yang dapat dijadikan mitra dalam memecahkan permasalahan sosial, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan;

5. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjaring informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber terkait penanganan masalah di Bidang Sosial;
6. Adanya kesempatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan lain-lain yang disediakan oleh berbagai instansi dan organisasi masyarakat.
7. Tersedianya dana-dana tambahan yang bersumber dari level pemerintahan yang lebih tinggi.

Peluang-peluang ini perlu diberdayakan agar program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang Tahun 2023. Terbukti dengan terselenggaranya beberapa kegiatan hingga tingkat capaian 100 %. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras para staf Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kondisi ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : ***”Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”***.. Sebagaimana disampaikan dalam Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

Tabel T-C 31

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Dinas Sosial Kabupaten Humbang
Hasundutan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentasi Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS	88%	712,013,400	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS	88%	712,013,400	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Humbang Hasundutan	Persentase PSKS yang berkompeten Presentase PSKS yang dibina dan difasilitasi	88% 100%	712,013,400	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Humbang Hasundutan	Persentase PSKS yang berkompeten presentase PSKS yang dibina dan difasilitasi	88% 100 %	712,013,400	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota (Tagana)	20 orang	178,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota (Tagana)	20 Orang	178,000,000	

2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota (TKSK)	11 Orang	189,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota (TKSK)	11 Orang	189,000,000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	34	296,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	34	296,000,000	
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Humbang Hasundutan	Jumlah sertifikat yang diberi hasil peningkatan sumberdaya manusia dan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kewenangan kab.kota	1 sertifikat	180,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Humbang Hasundutan	Jumlah sertifikat yang diberi hasil peningkatan sumberdaya manusia dan konsultasi kesejahteraan keluarga(LK3) Kewenangan kab.kota	1sertifikat	180,000,000	
II	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Humbang Hasundutan	Persentase Terrpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100	280,833,900	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Humbang Hasundutan	Persentase Terrpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100	280,833,900	

2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	100	280,833,900	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	100	280,833,900	
5	Penyediaan Makanan	Humbang Hasundutan	jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsi) Kewenangan kabupaten kota	100	159,586,900	Penyediaan Makanan	Humbang Hasundutan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsi) kewenangan kabupaten kota	100	159,586,900	
6	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yangtersedia pada masa tanggap Darurat	50	49,552,000	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap Darurat	50	49,552,000	
7	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Humbang Hasundutan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok Rentan kewenangan kabupaten/ kota	50	71,6956,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Humbang Hasundutan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok Rentan kewenangan kabupaten/kota	100	76956,000	
3	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20	60,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20	60,000,000	

8	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Humbang Hasundutan	Jumlah PSKS (Tagana) yang mendapat pelatihan dan Pengetahuan Taruna Siaga Menangani Bencana	20	60,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Humbang Hasundutan	Jumlah PSKS (Tagana) yang mendapat pelatihan dan Pengetahuan Taruna Siaga Menangani Bencana	20	60,000,000	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase PMKS yang mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya	10.49%	887,750,750	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase PMKS yang mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya	10.49%	887,750,750	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.34% 9,40%	677,384,570	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.34% 9,40%	677,384,570	
9	Penyediaan Permakanan	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	300 orang	373,384,570	Penyediaan Permakanan	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	300 orang	373,384,570	

10	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70 orang	150,000,000	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70orang	150,000,000	
11	Penyediaan Alat Bantu	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70 orang	75,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70orang	75,000,000	
12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	20	148,000,800	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	20	148,000,800	
15	Pemberian Layanan Kedaruratan	Humbang Hasundutan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	15 orang	79,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Humbang Hasundutan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	15 orang	79,000,000	

5	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.60%	210,366,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.60%	210,366,000	
17	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Humbang Hasundutan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	10,000 orang	55,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Humbang Hasundutan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	10,000 orang	55,000,000	
20	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Humbang Hasundutan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat bimbingan sosial	15 orang	155,366,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Humbang Hasundutan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat bimbingan sosial	15orang	155,366,000	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase Penanganan Fakir Miskin Secara Ekonomi	3.88%	1,405,495,570	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase penanganan Fakir Miskin Secara Ekonomi	3.88%	1,405,495,570	
7	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase data yang terupdate Persentase masyarakat yang dapat perlindungan dan jaminann sosial	100% 3,85%	556,165,537	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase data yang terupdate Persentase masyarakat yang dapat perlindungan dan jaminan sosial	100% 3,85%	556,165,537	

26	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	jumlah fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di Data	6,385	41,603,137	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	jumlah fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di Data	6,385	41,603,137	
27	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	jumlah keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6,385	246,413,400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin kabupaten/kota	6,385	246,413,400	
28	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Humbang Hasundutan	jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten/kota	35	268,149,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Humbang Hasundutan	jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	35	268,149,000	
V	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Humbang Hasundutan	Nilai AKIP	A	4,351,696,630	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Humbang Hasundutan	Nilai AKIP	A	4,351,696,630	
8	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	42,675,500	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	42,675,500	
30	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, LKjIP, LPPD dan LKPJ yang tersusun	8	35,000,000	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, LKjIP, LPPD dan LKPJ yang tersusun	8	35,000,000	

31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8	7,675,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8	7,675,500	
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95	2,351,104,369	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95	2,351,104,369	
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	22	2,339,538,476	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	22	2,339,538,476	
33	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Humbang Hasundutan	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan jumlah keuangan semester I dan II	15	11,565,893	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Humbang Hasundutan	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan jumlah keuangan semester I dan II	15	11,565,893	
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	95	155,787,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	95	155,787,500	
35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Humbang Hasundutan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22	22,687,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Humbang Hasundutan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22	22,687,500	

36	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang Aktif	22	12,100,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang Aktif	22	12,100,000	
37	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 orang	121,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 orang	121,000,000	
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95	375,230,340	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95	375,230,340	
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	5,923,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	5,923,000	
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	135,541,274	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	135,541,274	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	21,396,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	21,396,000	
41	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	10,572,066	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	10,572,066	

43	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	201,798,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	201,798,000	
	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 Unit	35,000,000	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional yang disediakan	1 Unit	35,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Humbang Hasundutan	Jumlah unit kendaran Dinas Operasional yang disediakan	1Unit	35,000,000	Penggadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Humbang Hasundutan				
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	107,985,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	107,985,000	
45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	2 orang	96,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	2 orang	96,000,000	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95	162,860,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95	126,860,000	

46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan '	Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6unit	112,860,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan '	Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	112,860,000	
47		Humbang Hasundutan	Jumlah Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya	3 unit	110,000,000		Humbang Hasundutan	Jumlah Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya	3 unit	110,000,000	
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaannya	1 unit	35,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaannya	1 unit	35,000,000	
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15,000,000	
JUMLAH					5,468,612,616					5,468,612,616	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Tahun 2025 didasarkan kepada RKPD DINAS SOSIAL Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;

- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik, misalnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dimana secara tidak langsung pemerintah juga merekrut karyawan dari masyarakat Humbang Hasundutan sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan masih banyak lagi kebijakan Nasional yang mendukung

kegiatan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan pokok serta fungsi Pegawai Dinas Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial melalui penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :“ *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* “

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis. Adapun Sasaran stategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial tersebut adalah :

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS
- 2. Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS
- 3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS
	Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS	Indeks Kepuasan PMKS yang ditangani
	Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP
--	---	----------------------

Untuk mencapai Sasaran Dinas Sosial maka dibuat Formula untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial. Adapun Formula dapat dilihat pada table berikut :

Tabel :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN IKU	
			ALASAN DIPILIH	FORMULA
Tujuan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan Kesejahteraan Masyarakat Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial	Mengacu pada Permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Cakupan Pemenuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial X Indeks Kepuasan PMKS yang Ditangani X Persentase Penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Sasaran	1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Cakupan Pemenuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Capaian Variabel 1 + Variabel 2}}{\text{Target Variabel 1 + Variabel 2}} \times 100$
	2. Meningkatnya Kualitas PSKS dalam penanganan PMKS	Indek Kepuasan Masyarakat	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat
	3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Mengacu pada Permensos nomor 9 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan Bencana sosial yang dilayani / Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial) X 100 %
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal dinas social	Nilai Evaluasi AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP OPD oleh APIP Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya menjadi sasaran program (kegiatan) Dinas Sosial.
2. Masukan-masukan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Penjelasan dan rincian program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

A. Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerinta Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu “Mewujudkan Humbang yang maju dan Bermentalitas Unggul” Maka Dinas Sosial berada pada Misi ke III. yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Kreatif dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

Dinas Sosial melaksanakan Tujuannya yaitu “***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial***” dengan Sasaran yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS
2. Meningkatnya Kualitas PSKS dalam Penanganan PMKS
3. Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

B. Pencapaian SDG’S

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SDG’S di sektor Sosial, adalah; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

C. Pengentasan Kemiskinan

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah maksimal, walaupun perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur.

Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk keluar dari kemiskinan, karena motivasi dari diri sendiri jugalah yang menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Seperti yang kita lihat dari kegiatan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Penyandang Disabilitas Fisik, Mental dan Lansia Terlantar serta meningkatkan peran aktif PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga Tercapai Tujuan Dinas Sosial Mewujudkan PMKS Mandiri dan Tercapainya Sasaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu : Menurunnya Jumlah Masyarakt Miskin

D. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan dan PMKS.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Alat Bantu

				4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				7	Pemberian Layanan Kedaruratan
				8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				9	Pemberian Layanan Kedaruratan
		3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				5	Pemberian Layanan Rujukan
				6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KABUPATEN/KOTA	7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan
	9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			6	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
	10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan '
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka perlu dibuat Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu sebagai rencana kerja Dinas Sosial Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan. Sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan untuk tahun 2025 yang bersumber dari DAU. Program dan Kegiatan Dinas sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C 33 berikut ini :

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Humbang Hasundutan

DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renvana Tahun 2025	
			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase Partisipasi PSKS Dalam Menangani PMKS	88%	712,013,400			88%	712,013,400
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Humbang Hasundutan	Persentase PSKS yang berkompeten Persentase PSKS yang dibina dan difasilitasi	88 % 100 %	712,013,400			88 % 100 %	712,013,400
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan PSKS Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota (Tagana)	20 orang	178,000,000			20 orang	178,000,000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Kemampuan PSKS Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota (TKSK)	11 orang	189,000,000			11 orang	189,000,000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah kemampuan pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PKH)	34	296,000,000			34	296,000,000

4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Humbang Hasundutan	Jumlah Sertifikat yang diberi hasil peningkatan sumber daya manusi dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga(LK3) Kewenangan Kab. Kota	1 Sertifikat	48,642,800			1 Sertifikat	48,642,800
II	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Humbang Hasundutan	Persentase Terrpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Sosial	100	280,833,900			100	280,833,900
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase korban bencana alam/sosial yang mendapat penanganan pemenuhan pangan dan sandang	100	280,833,900			100	280,833,900
5	Penyediaan Makanan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsi) Kewenangan Kabupaten Kota	100	159,586,900			100	159,586,900
6	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa tanggap Darurat	50	49,552,000			50	49,552,000
7	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	71,6956,000			50	71,6956,000
3	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20	60,000,000			20	60,000,000

8	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Humbang Hasundutan	Jumlah PSKS (Tagana) yang mendapat pelatihan dan Pengetahuan Taruna Siaga Menangani Bencana	20	60,000,000			20	60,000,000
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase PMKS yang mampu memenuhi Kebutuhan Dasarnya	10.49 %	887,750,570			10.49 %	887,750,570
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Masyarakat yang mendapat kebutuhan dasar Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.34 % 9,40 %	677,384,570			11.34 % 9,40 %	677,384,570
9	Penyediaan Permakanan	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	300 orang	373,384,570			300 orang	373,384,570
10	Penyediaan Sandang	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70 orang	150,000,000			70 orang	150,000,000
11	Penyediaan Alat Bantu	Humbang Hasundutan	Jumlah penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	70 Orang	75,000,000			70 Orang	75,000,000

12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima bimbingan sosial	20	148,000,800			20	148,000,800
13	Pemberian Layanan Kedaruratan	Humbang Hasundutan	Jumlah penerima layanan kedaruratan yang ditangani	15 Orang	79,000,000			15 Orang	79,000,000
5	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Humbang Hasundutan	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.60%	210,,366,000			1.60%	210,,366,000
14	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Humbang Hasundutan	Jumlah data PMKS yang termutakhirkan	10,000 orang	55,000,000			10,000 orang	55,000,000
15	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Humbang Hasundutan	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat bimbingan sosial	15 Orang	155,366,000			15 Orang	155,366,000
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Humbang Hasundutan	Persentase Penanganan Fakir Miskin Secara Ekonomi	3.88 %	1,405,495,570			3.88 %	1,405,495,570
6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Persentase data yang terupdate Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 % 3,85 %	556,165,537			100 % 3,85 %	556,165,537

16	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	jumlah fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di Data	6,385	41,603,137			6,385	41,603,137
17	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Humbang Hasundutan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6,385	246,413,400			6,385	246,413,400
18	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Humbang Hasundutan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35	268,149,000			35	268,149,000
V	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Humbang Hasundutan	Nilai AKIP	A	4,351,696,630			A	4,351,696,630
7	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	42,675,500			95	42,675,500
19	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, LKjIP, LPPD dan LKPJ yang tersusun	8	35,000,000			8	35,000,000
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8	7,675,500			8	7,675,500
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase realisasi keuangan program dan kegiatan	95	2,351,104,369			95	2,351,104,369
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	22	2,339,538,476			22	2,339,538,476
22	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Humbang Hasundutan	jumlah dokumen laporan keuangan, jumlah laporan keuangan akhir tahun dan	15	11,565,893			15	11,565,893

			jumlah keuangan semester I dan II						
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	95	155,787,500			95	155,787,500
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Humbang Hasundutan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22	22,687,500			22	22,687,500
24	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang Aktif	22	12,100,000			22	12,100,000
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Humbang Hasundutan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 orang	121,000,000			3 orang	121,000,000
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95	375,230,340			95	375,230,340
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	5,923,000			10 Paket	5,923,000
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	135,541,274			3 Paket	135,541,274
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	21,396,000			2 Paket	21,396,000
29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Humbang Hasundutan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	10,572,066			6 Paket	10,572,066
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	250 Laporan	201,798,000			250 Laporan	201,798,000

			SKPD						
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Humbang Hasundutan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 Unit	35,000,000			1 Unit	35,000,000
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Humbang Hasundutan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 Unit	35,000,000			1 Unit	35,000,000
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	107,985,000			95	107,985,000
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Humbang Hasundutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11,985,000			1 Laporan	11,985,000
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Humbang Hasundutan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan pengelola barang	2 orang	96,000,000			2 orang	96,000,000
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Humbang Hasundutan	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95	162,860,000			95	162,860,000
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan '	Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	112,860,000			6 unit	112,860,000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya	1 unit	35,000,000			1 unit	35,000,000
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Humbang Hasundutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15,000,000			15 Unit	15,000,000

JUMLAH		5,468,612,616				
--------	--	---------------	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang sosial. Untuk mengantisipasi minimnya dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan, dibutuhkan usaha aktif untuk mencari informasi terkait sumber-sumber dana dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya, dapat menyediakan solusi demi terlaksananya seluruh program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2025. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang sangat kami harapkan.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Doloksanggul, Maret 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**FRANS JUDIKA B. PASARIBU,SE.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19790804 200312 1 002**